

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Islam, arsip merujuk pada kumpulan dokumen, catatan, atau rekaman informasi yang disimpan untuk berbagai keperluan, seperti administratif, hukum, sejarah, atau tujuan lainnya. Dalam pandangan Islam, arsip memiliki posisi yang istimewa karena berkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, pelestarian sejarah, dan kemudahan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Islam menekankan pentingnya pencatatan, baik dalam bentuk fisik maupun simbolis, sebagai sarana untuk memberikan bukti serta panduan bagi individu maupun komunitas.

Al-Qur'an, Hadis, dan sejarah peradaban Islam memperlihatkan banyak contoh dan praktik yang mencerminkan perhatian serius terhadap pengelolaan informasi. Arsip memainkan peran krusial dalam menjaga harmoni masyarakat, memastikan keterbukaan, dan mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan fakta (Sholahuddin, 2023).

Al-Qur'an, sebagai kitab suci bagi umat Islam, memuat sejumlah ayat yang berkaitan dengan konsep pencatatan dan pengarsipan. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya dokumentasi dengan beberapa di antaranya secara khusus menggambarkan urgensi praktik tersebut. Terdapat pada Surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami pula yang akan menjaganya.” (Q.S Al-Hijr : 9).

Ayat ini menegaskan janji Allah untuk menjaga keaslian wahyu-Nya, yang diwujudkan melalui pengarsipan baik secara lisan maupun tertulis. Pada masa Nabi Muhammad, para sahabat, termasuk Zaid bin Tsabit, mendokumentasikan wahyu menggunakan berbagai media, seperti kulit, tulang, dan daun lontar. Proses ini menjadi landasan awal bagi pengembangan sistem pengelolaan arsip dalam tradisi Islam (Habibah, 2024).

Rasulullah SAW juga menaruh perhatian besar terhadap pentingnya pencatatan, sebagaimana tercermin dalam sejumlah hadis berikut:

"Ikatlah ilmu dengan menulisnya." (Riwayat At-Thabrani dan Al-Hakim).

Hadis ini mengindikasikan bahwa pencatatan merupakan metode yang efektif untuk melestarikan ilmu agar tidak lenyap. Arsip berfungsi sebagai media utama dalam menjaga keberlanjutan pengetahuan, termasuk di dalamnya hukum, sejarah, serta berbagai informasi penting lainnya.

Menurut (Kartadireja, Nurjamilah, & Ertinawati, 2020), Nabi Muhammad SAW kerap memanfaatkan surat tertulis sebagai sarana komunikasi, baik dalam menyampaikan dakwah kepada para pemimpin dunia maupun dalam membuat perjanjian. Beberapa contohnya adalah surat Nabi kepada Heraklius, Kaisar Romawi Timur, yang berisi ajakan untuk memeluk Islam dan dokumen tertulis yang digunakan dalam Perjanjian Hudaibiyah antara Nabi dan kaum Quraisy.

Dalam pandangan Islam, arsip lebih dari sekadar catatan administratif. Hal tersebut juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang sangat penting. Arsip berfungsi sebagai alat untuk menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan melestarikan warisan pengetahuan. Prinsip pengelolaan arsip yang baik telah diajarkan sejak masa Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh para sahabat, hingga diterapkan dalam peradaban Islam pada era kekhalifahan.

Dalam pandangan Islam, perpustakaan bukan sekadar lokasi untuk menyimpan buku atau menyediakan informasi, melainkan memiliki peran yang jauh lebih luas dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, proses pendidikan, dan penyebaran nilai-nilai agama. Islam menempatkan ilmu dan aktivitas membaca pada posisi yang sangat penting, sebagaimana tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni "Iqra'" (Bacalah) dalam Surah Al-Alaq (96:1). Dengan demikian, perpustakaan dalam tradisi Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengakses buku, tetapi juga menjadi pusat pengembangan peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam Islam, perpustakaan bukan hanya sekadar tempat untuk menyimpan buku, tetapi juga berperan sebagai media untuk mencari ilmu, memperdalam pengetahuan, dan meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia secara menyeluruh, sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam (Saepudin, 2020).

Produktivitas publik di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah hambatan baik yang bersifat struktural maupun kultural, sehingga berimplikasi pada mutu penyelenggaraan pelayanan publik. Secara sederhana, produktivitas publik dapat dimaknai sebagai kapasitas lembaga pemerintahan dalam menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat yang menginginkan layanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi dengan kondisi birokrasi yang sering kali berjalan lambat, terikat prosedur, dan kurang responsif terhadap perubahan. Kondisi ini semakin ditegaskan oleh hasil penelitian Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengungkapkan bahwa problem mendasar produktivitas aparatur sipil negara terletak pada rendahnya kinerja, lemahnya budaya kerja, belum optimalnya sistem manajemen kinerja, serta minimnya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (LAN, 2020).

Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah ketidakmerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur. Masih terdapat banyak ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga berimplikasi pada rendahnya mutu hasil pelayanan publik. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat bahwa distribusi ASN di Indonesia belum berjalan secara proporsional, di mana sebagian besar tenaga ASN lebih banyak terserap pada jabatan administratif daripada jabatan fungsional yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Situasi ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam produktivitas publik, karena sebagian besar energi birokrasi teralokasikan pada pekerjaan administratif alih-alih pelayanan yang bersifat substantif (BKN, 2021).

Di samping itu, rendahnya produktivitas publik di Indonesia juga dipengaruhi oleh kelemahan dalam sistem evaluasi serta mekanisme pengawasan. Banyak instansi pemerintah belum dilengkapi dengan instrumen penilaian kinerja yang terukur, berorientasi pada hasil, dan berbasis data yang akurat. Konsekuensinya, berbagai program publik kerap dijalankan tanpa adanya parameter yang jelas untuk menilai efektivitas maupun efisiensinya. World Bank (2020) menegaskan bahwa birokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menerapkan reformasi kelembagaan yang menitikberatkan pada pencapaian outcome, bukan hanya pada kepatuhan terhadap prosedur administratif semata.

Selain persoalan teknis, faktor kultural juga menjadi hambatan dalam peningkatan produktivitas publik. Budaya birokrasi yang masih didominasi oleh hierarki yang kaku, proseduralisme yang berlebihan, serta sikap resistif terhadap inovasi membuat organisasi publik kerap lamban dalam merespons kebutuhan masyarakat. Salah satu akar masalah birokrasi di Indonesia terletak pada rendahnya orientasi terhadap kepentingan publik, di mana birokrasi lebih menitikberatkan pada kepatuhan administratif daripada pencapaian hasil yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Akibatnya, pelayanan publik sering kali tidak sejalan

dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas pelayanan (Dwiyanto, 2011).

Lebih lanjut, rendahnya produktivitas publik juga berkaitan dengan lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintahan. Tidak sedikit kebijakan publik yang kurang efektif akibat adanya tumpang tindih kewenangan, minimnya sinergi antar lembaga, serta kurang optimalnya mekanisme kolaborasi lintas sektor. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah memperkuat koordinasi lintas instansi, baik dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan, agar pelaksanaan program publik dapat berlangsung secara konsisten dan berfokus pada pencapaian hasil (OECD, 2021).

Dalam konteks pengelolaan arsip dan perpustakaan di Provinsi Jawa Barat, produktivitas publik yakni kemampuan lembaga dalam memberikan layanan yang efektif, efisien, dan bermanfaat masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun teknis. Salah satu persoalan mendasar adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidang kearsipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat belum berjalan optimal, sebab tidak semua instansi terkait menyerahkan arsipnya kepada lembaga arsip untuk ditangani secara formal. Selain itu, aspek perlindungan dan perawatan arsip seperti pengaturan suhu ruangan, penataan fisik, hingga pelabelan belum sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga meningkatkan potensi kerusakan pada dokumen-dokumen penting. Kondisi ini secara langsung berdampak pada menurunnya kualitas layanan informasi publik dari sisi pengelolaan arsipologis (Wahyuningtias, 2025).

Efektivitas dalam pengelolaan arsip dinamis yakni arsip aktif yang terus diperbarui yang masih terhambat oleh keterbatasan kompetensi pegawai. Adanya penurunan skor dalam audit kearsipan, baik yang dilakukan secara internal maupun

oleh ANRI, sebagai bukti bahwa pengelolaan arsip dinamis belum berjalan optimal. Faktor kompetensi pegawai terbukti memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas tersebut, bahkan mencapai kontribusi positif hingga 79%. Temuan ini sekaligus menegaskan adanya peluang besar untuk melakukan perbaikan: melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM, produktivitas dalam pengelolaan arsip dinamis berpotensi meningkat secara substansial (Kojongian, 2024).

Permasalahan lain muncul pada aspek kinerja arsiparis yang belum sepenuhnya mencapai target, meskipun tingkat kompetensinya tergolong tinggi. Kompetensi arsiparis di Dispusipda Jabar berada pada kategori tinggi, begitu pula dengan capaian kinerjanya. Namun, meskipun terdapat korelasi yang cukup kuat (0,712), kompetensi hanya mampu menjelaskan sekitar 51% dari variasi kinerja arsiparis. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar kompetensi yang turut menghambat produktivitas fungsional dalam pelaksanaan tugas kearsipan (Margareta, 2024).

Aspek teknis pun masih menjadi sumber permasalahan yang signifikan. Fasilitas penyimpanan arsip sering kali belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ruang penyimpanan arsip di Jawa Barat masih belum memadai, penggunaan rak arsip masih bersifat konvensional, tingkat keamanan belum optimal, serta jarak antarbox penyimpanan tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur merupakan hambatan serius dalam proses pengelolaan arsip statis (Teryambodo & Putra, 2024).

Dalam bidang perpustakaan, tantangan serupa juga masih tampak jelas. Penerapan berbagai dimensi kualitas pelayanan seperti ketepatan waktu, responsivitas, dan keandalan belum terlaksana secara maksimal. Hambatan dalam penerapan teori kualitas layanan di lapangan mencerminkan adanya kelemahan pada aspek sistem, koordinasi, maupun ketersediaan sumber daya yang mendukung

(Bachmid, 2023). Secara umum, produktivitas publik dalam bidang arsip dan perpustakaan di Jawa Barat masih menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dan praktik yang dijalankan. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain distribusi SDM yang belum merata, keterbatasan infrastruktur fisik, sistem layanan yang belum berjalan optimal, serta proses transformasi digital yang masih menemui hambatan.

Dalam bidang kearsipan, salah satu persoalan utama yang berpengaruh terhadap produktivitas publik di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung terletak pada sistem pengelolaan arsip dinamis yang belum berjalan secara maksimal. Meskipun tahapan pengelolaan arsip dinamis mulai dari penciptaan hingga penyusutan telah dilaksanakan dengan dukungan sarana dan prasarana, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Contohnya, masih ditemukan arsip yang tidak sesuai dengan penomoran klasifikasi serta daftar arsip yang kurang rinci, sehingga saat pengguna membutuhkan temu kembali data, mereka tetap harus melakukan verifikasi manual terhadap arsip fisik. Kondisi ini bukan hanya memperlambat proses pelayanan administratif, tetapi juga menurunkan efisiensi operasional arsip sebagai pusat informasi sekaligus “memori” organisasi publik (Tarigan & Jumino, 2018).

Pada aspek layanan perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung memang memiliki koleksi yang cukup besar, mencakup puluhan ribu judul dan eksemplar dari berbagai kategori, mulai dari karya umum hingga bidang ilmu terapan. Namun, keberlimpahan koleksi fisik semata tidak dapat dijadikan indikator produktivitas yang optimal. Tantangan justru muncul dari faktor lain, seperti mutu layanan, kompetensi serta kesiapan sumber daya manusia, dan ketersediaan layanan publik berbasis digital yang semuanya merupakan elemen penting dalam mendukung produktivitas. Dalam sejumlah penelitian serupa di daerah lain, masyarakat kerap menyoroti rendahnya kompetensi pustakawan serta ketidakseimbangan antara jumlah staf dengan beban kerja, yang pada akhirnya

menimbulkan ketimpangan layanan dan menurunkan tingkat produktivitas secara keseluruhan (Mulyadi, 2023).

Secara lebih luas, produktivitas publik pada layanan arsip dan perpustakaan mencakup dimensi efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target pelayanan serta pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Meskipun di Kota Bandung telah diterapkan sistem pengelolaan arsip dinamis yang relatif baik dan didukung dengan kinerja pegawai yang tergolong tinggi, tetap diperlukan evaluasi yang lebih komprehensif untuk menilai sejauh mana hal tersebut benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas publik secara keseluruhan (Manangin, 2024).

Secara umum, Kota Bandung memiliki nilai kearsipan pada tahun 2024 mencapai 80,18. Hal ini menandakan bahwa peningkatan dari tahun sebelumnya dan mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah kota. Pada aspek audit eksternal dan internal, capaian tahun 2024 memperlihatkan hasil yang positif, meskipun nilai audit eksternal berada di angka 80,72 yang tidak sesuai dengan cita – cita sebelumnya yakni menaruh harapan pada angka 87,00. Namun, audit internal berhasil melebihi target dengan realisasi 79,37 dari target 65,00. Dengan demikian, Dinas Arsip dan Perpustakaan meraih peringkat pertama dengan nilai 95,01, diikuti oleh Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Apriani, 2024).

Tabel 1. 1 Kategori Penghargaan Arsiparis Tahun 2024

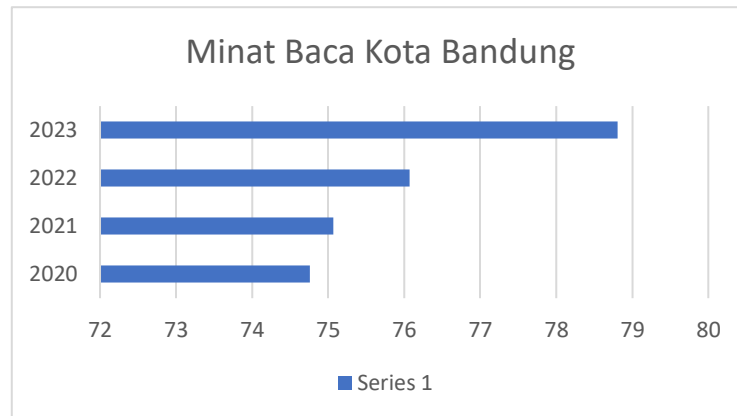
Peringkat	Kategori Penghargaan Arsiparis Setda/Badan/Instansi/tingkat kecamatan		
	Pemenuhan Arsiparis	Tanpa Pemenuhan Arsiparis	Tingkat Kecamatan
1	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (<i>Poin: 95,01</i>)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (<i>Poin: 87,7</i>)	Kecamatan Cibiru (<i>Poin: 92,01</i>)
2	Badan Pendapatan Daerah (<i>Poin: 93,33</i>)	Dinas Pendidikan (<i>Poin: 85, 59</i>)	Kecamatan Cidadap (<i>Poin: 90,04</i>)
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (<i>Poin: 90,42</i>)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (<i>Poin: 85,47</i>)	Kecamatan Cicendo (<i>Poin: 89,94</i>)
4			Kecamatan Mandalajati (<i>Poin: 89,66</i>)
5			Kecamatan Rancasari (<i>Poin: 89,64</i>)
6			Kecamatan Cinambo (<i>Poin: 89,52</i>)

Sumber: (Diolah Peneliti, 2025)

Sebagai bagian dari Kota Bandung yang dikenal dengan kreativitas dan budayanya, Dinas Arsip dan Perpustakaan juga aktif menyelenggarakan berbagai program literasi, pelatihan, dan kegiatan komunitas. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan minat baca, mengembangkan keterampilan literasi

digital, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya arsip sebagai warisan budaya dan sumber informasi sejarah.

Gambar 1. 1 Indeks Baca Kota Bandung



Sumber: PORTAL JABARPROVGOID IBM Kota Bandung Terus Meningkat

Tabel diatas menunjukan bahwa program kegiatan yang berkaitan dengan meningkatkan masyarakat yang literat terus – menerus meningkat secara signifikan. Hal itu bisa dibuktikan bahwa pada tahun 2020 IBM (Indeks Baca Masyarakat) mencapai 74,76. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 75,07. Pada tahun 2022 sebesar 76,07. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar 78,81.

Untuk menguraikan kesenjangan yang ada pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan teori strategi organisasi publik yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan pada Tahun 2009. Hal tersebut menjadi landasan teori peneliti dikarenakan strategi publik yang berhasil membutuhkan perpaduan antara pemanfaatan kekuasaan, penguasaan pengetahuan, sikap transparan, dan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan. Selain itu, buku ini menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan strategi adalah elemen yang sangat penting.

Penelitian ini memiliki daya tarik yang signifikan dan relevansi yang mendalam karena keberhasilan dalam menyusun dan menerapkan strategi kebijakan yang

efektif dapat menghasilkan dampak yang luas serta berkelanjutan. Kebijakan yang dirancang secara strategis tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan oleh dinas atau lembaga terkait, tetapi juga menciptakan efek domino berupa peningkatan produktivitas masyarakat secara menyeluruh.

Ketika kebijakan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan untuk menunjang kehidupan mereka. Akses yang lebih mudah ini berdampak positif pada banyak aspek kehidupan, termasuk peningkatan taraf ekonomi, penguatan sektor pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Di samping itu, kebijakan yang berorientasi pada produktivitas masyarakat dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja baru, dan meningkatkan daya saing masyarakat di tingkat lokal, nasional, bahkan global.

Selain manfaat tersebut, penelitian ini memiliki peran strategis karena memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan yang efektif dapat menjadi penghubung yang memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya layanan publik yang lebih berkualitas, masyarakat cenderung meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Kepercayaan ini, pada gilirannya, memperkuat hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan kondisi di mana masyarakat merasa didukung dan difasilitasi untuk berkembang.

Lebih jauh lagi, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam menentukan strategi kebijakan yang tepat, tetapi juga mengungkap bagaimana kebijakan tersebut dapat memaksimalkan potensi masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada peningkatan fungsi lembaga atau dinas yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan efek positif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat individu, keluarga, maupun komunitas.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sumber referensi penting bagi berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi yang berupaya menciptakan inovasi dan perubahan yang berkelanjutan melalui kebijakan publik yang progresif. Dampak dari penelitian ini diharapkan mampu membangun sistem pelayanan yang lebih inklusif dan produktif, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul: **“Strategi Organisasi Publik Pada Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Bandung Dalam Meningkatkan Produktivitas Publik”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang di jadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya:

1. Minimnya jumlah tenaga profesional di sektor kearsipan dan perpustakaan Indonesia, termasuk wilayah Kota Bandung, masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan tenaga arsiparis yang kompeten. Berdasarkan data yang tersedia, hanya sekitar 2,25% dari total kebutuhan nasional akan arsiparis yang telah terisi. Kekurangan ini dipengaruhi oleh rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap profesi arsiparis serta kurangnya apresiasi terhadap sumber daya manusia di bidang kearsipan. Situasi ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap mutu pengelolaan arsip dan efektivitas pelayanan informasi publik di berbagai lembaga pemerintahan.
2. Kendala dalam transformasi digital kearsipan dan perpustakaan di tengah perkembangan teknologi saat ini. Tuntutan untuk menerapkan sistem pengelolaan arsip dan perpustakaan yang berbasis digital semakin meningkat. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga profesional, serta rendahnya kemampuan teknologi yang tersedia. Kendala – kendala tersebut menghambat terciptanya sistem informasi yang efektif, cepat, dan terjamin keamanannya. Akibatnya, akses masyarakat

terhadap informasi menjadi terbatas yang pada akhirnya dapat memengaruhi produktivitas dan kualitas layanan publik.

3. Bagi sebagian besar generasi muda, perpustakaan masih dianggap sebagai tempat yang ketinggalan zaman dan kurang relevan dengan perkembangan zaman. Pandangan ini menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan dan partisipasi generasi milenial dalam memanfaatkan fasilitas dan layanan perpustakaan. Padahal, perpustakaan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan budaya literasi dan meningkatkan produktivitas masyarakat secara luas.
4. Walaupun Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung telah melaksanakan sejumlah program, upaya tersebut masih memerlukan perencanaan strategi organisasi publik yang lebih terstruktur, terpadu, dan terukur guna mendorong peningkatan produktivitas masyarakat secara lebih optimal dan berkelanjutan.
5. Partisipasi masyarakat dalam mengakses maupun berkontribusi terhadap pengembangan layanan arsip dan perpustakaan masih belum maksimal. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dijalankan dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mendorong peran aktif masyarakat, agar mereka tidak sekadar menjadi pengguna, tetapi turut andil dalam proses inovasi dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis informasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang di jadikan sebagai bahan peneletian selanjutnya:

1. Bagaimana cara menentukan tujuan Disarpus Kota Bandung dalam meningkatkan produktivitas publik?
2. Bagaimana lingkungan yang diciptakan oleh Disarpus Kota Bandung dalam meningkatkan produktivitas publik?
3. Bagaimana tindakan atau aksi dari Disarpus Kota Bandung dalam meningkatkan produktivitas publik?

4. Bagaimana pengarahan yang diberikan oleh Disarpus Kota Bandung dalam meningkatkan produktivitas publik?
5. Bagaimana pembelajaran atau bentuk evaluasi dari Disarpus Kota Bandung agar terciptanya strategi organisasi yang dapat meningkatkan produktivitas publik?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis antara lain:

1. Cara penentuan tujuan atau prioritas dari Disarpus Kota Bandung dalam meningkatkan produktivitas publik.
2. Lingkungan yang diciptakan oleh Disarpus Kota Bandung dalam meningkatkan produktivitas publik.
3. Tindakan atau aksi yang diberikan oleh Disarpus Kota Bandung dalam meningkatkan produktivitas publik.
4. Jenis intruksi atau pengarahan yang diberikan oleh Disarpus Kota Bandung dalam meningkatkan produktivitas publik.
5. Bentuk pembelajaran atau evaluasi dari Disarpus Kota Bandung agar terciptanya strategi organisasi yang dapat meningkatkan produktivitas publik.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. **Secara teoritis**, penelitian ini memberikan sumbangan penting bagi pengembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam hal kebijakan arsip dan perpustakaan. Dengan merujuk pada teori Geof Mulgan (2009) sebagai acuan, penelitian ini tidak hanya memperluas wawasan mengenai mekanisme kebijakan di bidang arsip dan perpustakaan, tetapi juga menekankan pentingnya penerapan strategi yang efektif untuk mendukung peningkatan produktivitas masyarakat. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi akademisi dan

mahasiswa dalam menggali lebih dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan arsip dan perpustakaan di masa mendatang.

2. **Secara praktis**, penelitian ini memberikan manfaat praktis yang nyata bagi Pemerintah Kota Bandung. Temuan yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Selain itu, manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui berbagai program pemerintah, termasuk yang diinisiasi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan serta program terkait arsip dan perpustakaan di masa depan.

F. Kerangka Berpikir

Harbani Pasolong menitikberatkan empat alasan utama. Pertama, terdapat perubahan orientasi dalam administrasi negara yang kini lebih berfokus pada aktivitas yang dilakukan oleh, untuk, dan demi kepentingan publik, sehingga pendekatannya bergeser dari negara menuju publik. Kedua, dalam berbagai literatur sejarah, istilah yang lebih sering digunakan adalah Administrasi Publik (Public Administration) daripada Administrasi Negara (State Administration). Ketiga, dari sudut pandang akademis, penting untuk menghindari interpretasi yang hanya mengacu pada gabungan kata "administrasi" dan "publik," melainkan menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep administrasi publik. Keempat, penekanan pembahasannya lebih diarahkan pada kepentingan publik daripada kepentingan negara.

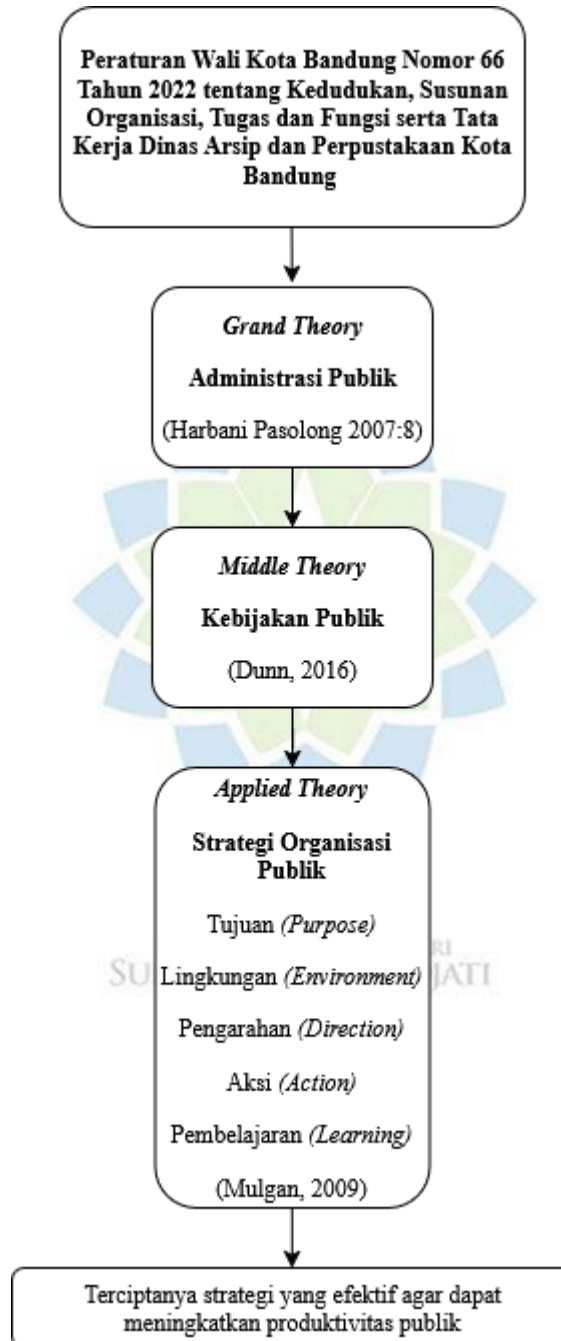
Menurut Dunn (2016) dalam teori kebijakan publik mengemukakan relevansi terkait pengkajian strategi yang diterapkan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Kota Bandung dalam ranah kebijakan publik, khususnya berkaitan dengan peningkatan produktivitas masyarakat melalui program literasi dan pengelolaan arsip. Oleh karena itu, kebijakan publik menjadi fokus utama dalam

analisis ini, mengingat strategi Disarpus mencerminkan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendorong terjadinya perubahan sosial.

Teori organisasi sektor publik membimbing untuk menyusun strategi yang secara langsung memengaruhi mutu layanan dan tingkat produktivitas masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan fokus utama Disarpus Kota Bandung dalam penelitian ini, yakni mendorong peningkatan produktivitas publik melalui penyediaan layanan kearsipan dan perpustakaan.



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir



Sumber : (Diolah Peneliti, 2025)

G. Proposisi

Strategi organisasi publik di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung berpotensi meningkatkan produktivitas publik apabila dijalankan melalui perencanaan tujuan yang jelas, dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, evaluasi berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat. Kombinasi inovasi digital dan penguatan budaya organisasi menjadi faktor kunci yang mempercepat layanan arsip dan perpustakaan, sehingga tercipta strategi organisasi publik yang lebih efektif, efisien, dan berdaya guna.

